

POLITIK UANG DALAM PEMILUKADES DESA CANGKRING DAN DESA DAWUAHAN, KECAMATAN TALANG, KABUPATEN TEGAL 2012

Fuji Hastuti, Dra. Wiwik Widayati, Drs. Priyatno Harsasto, MA

Universitas Diponegoro

ABSTRAKSI

Pemilukades merupakan suatu pemilihan untuk memilih pemimpin di daerah secara langsung dan demokratis. Namun, dalam penyelenggaraannya, Pemilukades dikotori oleh pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yang mark terjadi adalah praktik politik uang (money politics). Politik uang (money politics) merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukades, karena dapat mempengaruhi pemilih dan melunturkan nilai-nilai demokrasi dalam Pemilukades. Politik uang (money politics) adalah segala bentuk pemberian uang dan barang dari kandidat, kepada pemilih yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih. Dalam pelaksanaan Pemilukades, bentuk dan pola politik uang (money politics) yang terjadi sangat beragam dan bervariasi.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berisi tentang gambaran atau melukis keadaan yang sedang di teliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam, tentang apa yang sedang di teliti dan menjadi pokok permasalahan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan, Kecamatan Talang kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana peneliti cenderung memilih responden yang dianggap mengerti dan dapat menjadi sumber data yang relevan dan mengetahui permasalahan secara mendalam. Teknik pengambilan data menggunakan data primer yaitu wawancara dengan informan dan data sekunder yaitu pengumpulan data dengan merujuk sumber tertulis sebagai data pendukung.

Dalam Pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan 2012, politik uang yang terjadi sangat tinggi. Hal ini terjadi karena politik uang telah menjadi budaya masyarakat Desa Cangkring dan Desa Dawuhan. Budaya politik uang tidak lepas dari faktor kemiskinan, mentalitas, dan kultur yang melihat politik sebagai sarana untuk hal-hal yang sifatnya materialistik. Adanya slogan “laka duit laka acara nyoblos” yang dapat di artikan “tidak ada uang, berarti tidak mencoblos”. Hal ini menunjukkan bahwa peran politik uang di Pemilukades berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan. Bentuk maupun pola politik uang yang terjadi dalam Pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan sangat bervariasi dan beragam. Berdasarkan penelitian bentuk dan pola politik uang yang terjadi meliputi: 1) pembentukan tim sukses 2) waktu (kampanye “serangan fajar”) 3) wujud politik uang (uang, dan barang)

PENDAHULUAN

I. LATARBELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara yang menganut system demokrasi. Negara yang berdasarkan demokrasi, maka mendapatkan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui proses pemilihan umum. Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Fenomena pemilihan umum secara langsung tak sepenuhnya berjalan dengan baik. Sinyalemen politik uang terjadi sejak rekrutmen calon oleh partai sampai pemungutan suara. Praktik politik uang di Indonesia dimulai pada proses demokrasi pada tingkat yang paling rendah, yaitu pada pemilihan kepala desa (Pemilukades). Para calon acapkali menjadi “sinterklas” menjelang hari H atau hari pemungutan suara. Mereka membagi-bagikan sejumlah uang atau barang agar pilihan rakyat jatuh kepadanya, tidak jarang seorang kepala desa harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk meraih kemenangan dalam Pemilukades.

Pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*) praktik politik uang sangat tumbuh subur, mereka dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena mereka tidak merasa bahwa politik uang harus di jauhi. Hal ini, sudah menunjukkan betapa politik uang telah mendarah daging di masyarakat pada tingkat akar rumput (bawah) sampai tingkat elit. Perbedaan pada tingkat rumput, praktik tersebut lebih transparan dan tidak menjadi persoalan yang sensitif. Sedangkan pada tingkat elit politik uang lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif.

Praktik politik uang dalam penggunaan uang untuk membeli suara sesungguhnya bukan barang baru didalam praktik di Indonesia, karena sejak awal tahun 1970an di era Soeharto atau disebut masa orde baru, praktik tersebut sudah dikenal luas oleh publik.

Disadari atau tidak, penggunaan politik uang sebagai alat mencapai tujuan politik telah mengesampingkan uang dari posisi sebagai tujuan utama pelaku transaksi politik uang akhirnya mendapatkan uang sebagai konsekuensi dari kekuasaan. Tetapi ketika mereka bertransaksi focus tidak tilakukan pada uang itu sendiri melainkan pada “kekuasaan”.

Politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukades sangat tinggi. Transaksi uang dari calon kepada pemilih sangat besar guna memenangkan perolehan suara dalam suatu pemilukades. Politik uang tersebut dilakukan oleh atau dari kandidat yang ditunjukan kepada calon pemilih yang secara tidak langsung bertujuan memaksa pemilih untuk memilih suatu kandidat tertentu. Di dalam pelaksanaan pemilukades, banyak ditemui bentuk dan pola politik uang yang semakin bervariasi.

Desa Cangkring dan Desa Dawuhan baru saja menyelenggarakan pemilukades, berdasarkan pada pengalaman pemilukades sebelumnya baik di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan serta Desa lainnya politik uang untuk memberi suara sudah umum terjadi.”

II. LANDASAN TEORI

a. Pemilihan Kepala Desa

Berbeda dengan pilpres ataupun pilkada pemilukades telah berlangsung telah lama diselenggarakan secara langsung jauh sebelumnya, pemilihan desa secara langsung dinilai signifikan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi yang sehat dapat dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang cerdas, mandiri dan bermartabat (Amrudin & Zaini Bisri).

Pemilihan kepala desa merupakan praktik demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa. Mengingat fungsi aparatatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi warga desanya, Untuk itu harus benar-benar seorang pancasialis sejati yang penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi. Sebelum menjadi kepala desa, kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia, oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat, sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak dicabut hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (Mujianto).

b. Partisipasi Politik

Politik adalah keikutsertaan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan (Prihatmoko, 2008: 46).

Partisipasi politik juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara (Raga maran 2007:147). Bentuk dan partisipasi politik seseorang tampak dalam aktifitas-aktifitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) untuk memilih calon wakil rakyat maupun untuk memilih kepala Negara.

c. Perilaku Politik

Menurut Huntington dan Nelson, perilaku politik masyarakat dapat berubah-ubah sesuai dengan prefensi yang melatarinya. Kejadian itu sangat memungkinkan karena setiap manusia dan masyarakat hidup dalam suatu ruang yang bergerak. Berbagai perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik, banyak ditunjukkan oleh mereka diantaranya disebabkan oleh perubahan sistem politik, tumbuhnya kesadaran kelas, termasuk orang yang berpengaruh pada suatu partai politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, program yang ditawarkan pasangan calon, dan masih banyak lagi (Agustino, 2009: 197).

Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Dalam pelaksanaan pemilu suatu Negara, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu, pemilukades ataupun pemilu lainnya tersebut

d. Perilaku Pemilih

Dinyatakan sebagai pemilih dalam pemilu/pemilukades yaitu mereka yang telah mendaftar sebagai peserta pemilu oleh petugas pendata peserta pemilu. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya. Konsituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideology tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin (Firmansyah, 2007:105).

Perilaku pemilih dapat ditunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih langsung Kepala Desa dalam pemilu/pemilukades secara langsung. Perilaku memilih menurut Surbakti adalah “aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or no vote*) di dalam suatu pemilihan umum (Surbakti, 1997:170).

e. Politik Uang

Politik uang dapat diartikan sebagai seni untuk memenangkan posisi yang menguntungkan bersaranakan uang dalam rangka upaya merebutkan kekuasaan dalam kehidupan bernegara (Sumartini, 2004: 123). Selain itu politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara (Ismawan, 1999:5). Pemahaman tentang politik uang sebagai tindakan membagi-bagikan uang untuk membeli suara. Politik uang sudah mengalami pembiasaan makna. Publik memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang, barang atau iming-iming sesuatu kepada massa (calon pemilih) secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan

keuntungan politik. Artinya tindakan money politik itu dilakukan secara sadar oleh pelaku. Politik uang tetap mungkin terjadi walaupun disadari oleh satu diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi (Ismawan, 1999: 5).

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1. DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

Kabupaten Tegal adalah salah satu wilayah dari bagian provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 108°57'6" - 109°21'30" bujur timur dan 6°50'41" - 7°15'30" lintang selatan. Curah hujan di Kabupaten Tegal rata-rata 134,04 mm dengan 114 hari curah hujan, untuk keadaan curah hujan cukup, sedang untuk temperatur terendah 25°C dan tertinggi 31°C. Ketinggian permukaan laut Kabupaten Tegal di bagi menjadi 4 (empat) yaitu : Wilayah Slawi sekitarnya 42 Meter, Wilayah Lebaksiu sekitarnya 135 Meter, Wilayah Bumi Jawa sekitarnya 949 Meter, Wilayah Kramat sekitarnya 11 Meter. Secara tipologis Kabupaten Tegal dibagi menjadi tiga kategori meliputi: Daerah Pantai yaitu Meliputi Kecamatan Kramat, Surodadi dan Warurejo, Daerah Dataran Rendah yaitu Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, Warurejo, Kedungbanteng dan Pangkah, Daerah Dataran Tinggi yaitu Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumi Jawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng. Kabupaten Tegal mempunyai luas wilayah 87.878.555 Ha (878,79 KM²) yang terdiri dari 40.234 Ha lahan sawah dan 67.645 Ha lahan bukan sawah. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Tegal terdiri atas 18 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan

2. DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN TALANG

Kecamatan Talang Merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal, yang terletak 8 KM arah utara dari Ibu Kota Kabupaten Tegal. Kecamatan Talang mempunyai luas 1.839 Ha, yang terdiri dari 1.064 Ha lahan sawah dan 775 Ha lahan bukan sawah. Kecamatan Talang berada dalam ketinggian 13 M dari permukaan air laut, curah hujan di Kecamatan Talang adalah 11 mm untuk keadaan cukup. Kecamatan Talang terbagi menjadi 19 wilayah administrasi pedesaan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan talang yaitu 23.936 KK, Jumlah rukun tetangga (RT) Kecamatan Talang 372 dan rukun warga (RW) 84 yang terbagi menjadi 19 Desa.

3. DAERAH PENELITIAN

a. Desa Cangkring

Desa cangkring merupakan wilayah perdesaan dengan memiliki empat rukun warga (RW) dan 20 rukun tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Cangkring pada akhir tahun 2010 sebanyak 5.337 jiwa, yang terdiri laki-laki 2.720 jiwa dan perempuan 2.617 perempuan.

jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga kepadatannya cukup tinggi pula. luas tanah menurut kegunaannya pada tahun 2011 paling banyak adalah tanah sawah sebanyak 135 Ha, posisi kedua yaitu irigasi yaitu 124,473 Ha. Sedangkan luas tanah yang paling kecil adalah perkantoran

b. Desa Dawuhan

Desa Dawuhan adalah wilayah pedesaan yang mempunyai enam Rukun Warga (RW), 24 Rukun Tetangga (RT) dan 1.397 Kartu Keluarga (KK). Desa Dawuhan terletak kurang lebih 13,5 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Tegal dan 150 Km dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi geografis Desa Dawuhan berada di ketinggian 2 Meter dari atas permukaan laut, Desa Dawuhan memiliki curah hujan 2000 mm dan suhu udara rata-rata 25°C dan panjang jalan Desa Dawuhan adalah 4,25 Km.

4. GAMBARAN UMUM PEMILUKADES DESA CANGKRING DAN DESA DAWUHAN

a. Gambaran Umum Pemilukades Desa Cangkring

Pemilukades Desa cangkring tahun 2012, memilih kepala Desa untuk periode 2013-2018 yang terdiri dari 3 pasangan calon, adapun calon kepala Desa periode 2013-2018 meliputi : Busro Efendi (Gambar Padi), Ri'pai (Gambar Ketela), Karyanto (Gambar Jagung). Tiga calon yang bertarung dalam pemilukades Desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal berasal dari berbagai kalangan. Calon Busro merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa angkut barang dan pemasok kayu untuk para pengrajin mebel yang ada di daerah sekitar, basis kekuatan masa pada Busro adalah para ulama yang tergabung pada partai PKB. Karyanto merupakan pengusaha yang bergerak di bidang mebel, Karyanto adalah seorang yang mempunyai trah atau garis keturunan Lurah atau Kepala Desa, kakek dan pamannya masa jayanya adalah seorang kepala desa di Desa Cangkring, basis kekuatan masa pada karyanto adalah kelompok yang loyal terhadap keluarganya dan tergabung dalam partai PDI.P (nasionalis) . Sedangkan Ri'pai berasal dari Karyawan swasta sebuah perusahaan mebel di Jakarta. Basis kekuatannya adalah para nasionalis yang tergabung dalam partai PDI.P. di Desa Cangkring basis kekuatan PDI.P yang biasanya selalu memenangkan Pemilihan Umum Nasional pada pemilukades 2012 terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu Karyanto dan kubu Ripa'i

b. Gambaran Umum Pemilukades Desa Dawuhan

Pemilukades Desa Dawuhan tahun 2012, memilih kepala Desa untuk periode 2013-2018 yang terdiri dari tiga pasangan calon, adapun calon kepala desa periode 2013-2018 meliputi : Fahtoni (Gambar Padi), Suratna, S.E (Gambar Ketela), Abu Amar (Gambar Jagung). Tiga calon yang bertarung dalam pemilukades Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal berasal dari berbagai kalangan. Calon Fahtoni merupakan seorang tukang kayu, yang dianggap sebagai sosok yang sederhana dan peduli sama orang kecil, Fahtoni mempunyai basis kekuatan pada partai PDI.P yang dianggap mewakili sosoknya yang merakyat dan pro terhadap wong cilik karena berasal dari golongan kecil. Fahtoni juga mempunyai basis kekeluargaan yang besar di

Desa Dawuhan. Suratna, S.E merupakan seorang pegawai PLN, Suratna adalah seorang lulusan sarjana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri, jadi Suratna adalah seorang dianggap mewakili kaum terpelajar di Desa Dawuhan, namun sayangnya Suratna tidak mempunyai basis kekuatan politik yang ikut mendukungnya. Sedangkan Abu Amar adalah seorang pedagang beras yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Dawuhan. Basis kekuatan politiknya adalah para ulama yang tergabung dalam partai politik PKB.

PEMBAHASAN

Dalam pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan 2012, politik uang yang terjadi sangat tinggi. Hal ini terjadi karena politik uang telah menjadi budaya masyarakat di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan. Budaya politik uang yang terjadi di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan tidak lepas oleh faktor kemiskinan ekonomi, mentalitas, dan kultur yang melihat politik sebagai sarana untuk hal-hal yang sifatnya materialistik. Dalam hal ini, kesucian nilai demokratisasi dalam pemilu kades dapat dibeli dengan uang. Masyarakat Desa Cangkring dan Desa Dawuhan menghendaki bahkan mengharapkan pemberian materi dari suatu calon atau kandidat yang maju menjadi calon kepala Desa periode 2013-2018, sehingga praktek politik uang menjadi kewajaran dan sulit untuk dicegah. Adanya jargon “*laka duit laka acara nyoblos*” yang dapat diartikan “tidak ada uang, berarti tidak mencoblos”, masyarakat dalam hal ini memilih mau berangkat ke TPS untuk menyuarakan suaranya kalau diberi uang, jika tidak diberi uang, memilih pun enggan di untuk nyoblos dan lebih baik berangkat kerja daripada sekedar nyoblos yang tidak imbas dan makna apapun buat mereka. Hal ini berarti peran uang atau politik uang sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan. Pengaruh politik uang dalam pemilu kades di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan sangat besar, rata-rata semua calon melakukan praktek politik uang guna mempengaruhi pemilih untuk mendongkrak suara dalam pemilihan.

Bentuk maupun pola politik uang yang terjadi dalam pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan sangat bervariasi dan beragam. Berdasarkan yang telah dilakukan dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Waktu (Timing) Politik Uang

a. Kampanye

Pemberian uang maupun barang (politik uang) marak terjadi saat kampanye pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan berlangsung. Pengerahan massa dilakukan calon dengan membagi-bagikan uang dan kaos dengan dalih uang capek ataupun uang ganti rugi karena telah meluangkan waktu.

b. Serangan Fajar

Politik uang paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan atau lebih dikenal dengan sebutan “serangan fajar” yaitu pemberian uang maupun barang (politik uang) pada saat

subuh atau dinihari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon. Aliran yang mengalir dari calon biasanya sangat besar, masing-masing calon memberikan barang (sembako, kaos dll) maupun uang yang bervariasi jumlahnya. Distribusi uang dari calon kepada pemilih dilakukan oleh tim sukses yang dibantu oleh orang-orang kepercayaan dari masing-masing calon, hal ini dikarenakan agar tidak ada penyimpangan

2. Wujud Politik Uang

Pola dan bentuk politik uang dalam pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal bermacam-macam wujudnya seperti :

a. Uang

Bentuk politik uang dalam bentuk uang merupakan bentuk yang sangat lazim terjadi. Bentuk politik uang dalam pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan sangat tinggi dan bentuknya memang bervariasi, namun tidak dapat dipungkiri bentuk uang masih menjadi trend dalam pemilu kades. Dilihat dari segi jumlah atau nominal bervariasi, di Desa Cangkring antara masing-masing calon memberikan dalam jumlah yang berbeda dari Rp. 35.000.00,- hingga Rp.100.000.00,-. Sedangkan di Desa Dawuhan masing-masing calon memberikan dalam jumlah Rp. 60.000.00,- sampai dengan Rp. 120.000.00,-

b. Barang

Bentuk politik uang yang terjadi dalam pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan lainnya adalah barang, seluruh calon di kedua Desa membagi-bagikan barang berupa sembako, kaos dll. Hal ini dilakukan oleh seluruh calon untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

c. Kolektif atau kelompok

Pola atau bentuk politik uang dalam pemilu kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan 2012 tidak hanya ditunjukan kepada individu saja yang berbentuk uang maupun barang, melainkan juga kolektif atau kelompok. Adanya pembuatan sarana dan prasarana public seperti pembangunan dan renovasi tempat beribadah, jalan, di Desa Cangkring juga ada salah satu calon yang membuat saluran irigasi untuk petani.

3. Pengaruh Politik Uang

Budaya politik uang pada pemilu kades Desa Cangkring masih menjadi salah satu factor yang sangat mendongkrak perolehan suara tiap calon. Itu juga mengontrol partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara siapa yang memberikan uang dan barang paling banyak maka itulah yang pilih oleh masyarakat. Namun hal tersebut tidak terjadi pada pemilu kades Desa Dawuhan karena hampir seluruh calon membagikan uang dan barang kepada seluruh

lapisan masyarakat jadi masyarakat di desa Dawuhan tetap memilih salah satu calon atau figure yang menurut mereka paling baik

Pemilih di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan dapat dikategorikan sebagai pemilih yang rasional. Seorang pemilih yang rasional adalah pemilih yang menghitung untung-rugi dari tindakannya. Sebuah tindakan dikatakan “menguntungkan” bila ongkos yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut lebih rendah dari hasil itu sendiri. Sebaliknya, sebuah tindakan disebut “rugi” bila ongkos untuk mendapatkan hasil itu lebih tinggi nilainya ketimbang hasil yang diperoleh.

Politik uang yang terjadi di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan, paling efektif dilakukan pada saat hari H pencoblosan. Politik uang efektif untuk pemilih yang mempunyai identifikasi terhadap kandidat (*floating mass*). Politik uang efektif apabila didukung oleh militansi pemilih terhadap suatu calon atau kandidat yang member uang atau barang (politik uang).

BAB IV

KESIMPULAN

Pengaruh politik uang dalam Pemilukades di Desa Cangkring dan Desa Dawuhan berbeda karakteristik, di Desa Cangkring politik uang masih menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh calon pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Hal itu juga mengontrol partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara, siapa yang memberikan uang dan barang paling banyak makan calon tersebutlah yang akan dipilih oleh pemilih

Di Desa Dawuhan perilaku pemilihnya tidak di pengaruhi oleh politik uang, hal tersebut dikarenakan seluruh calon yang mendaftar sebagai kepala desa memberikan uang dan barang kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak suara dalam Pemilukades. Pemberian uang barang (politik uang) tidak menjadi alasan utama calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos atau memilih salah satu calon tertentu. Tetapi mereka lebih melihat dari figur calon tersebut

SARAN

Politik transaksional atau lebih dikenal dengan politik uang yang sering mewarnai setiap berlangsung pemilukades itu, berlangsung karena terjadi suka sama suka, akibat runtuhnya keyakinan politik mensejahterakan masyarakat. Praktik politik uang atau politik transaksional ini, diperkirakan masih akan terjadi dalam pemilukades mendatang, jika kesadaran masyarakat sangat kurang dan lebih mementingkan materi. Untuk mengurangi praktik politik uang, pemerintah perlu mengupayakan pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat atau sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya praktek politik uang yang akan berdampak oada kinerja pemimpin terpilih, karena aka nada kaitannya dengan tindak korupsi untuk mengembalikan modal pada saat pemilihan. Hal ini, secara tidak langsung ajan terlihat bahwa masyarakat yang

nantinya akan menjadi korban. Pemerintah diharapkan aktif memberikan kesadaran politik dan menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam pemilu, sehingga pelaksanaan demokrasi dapat sesuai dengan harapan dan dapat berbanding lurus kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan terpilihnya pemimpin yang jujur, adil dan pintar mengelola suatu desa demi kemajuan desa pada khususnya dan kemajuan Negara pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Loe. *Pilkada dan dinamika politik local*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006
- Arifin, Anwar. *Pencitraan Dalam Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia 2006.
- Asfar, Muhammad. *Mendesain manajemen pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka 2006
- Firmansyah, *marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007.
- Ismawan, Indra. *Money Politik (pengaruh Uang Dalam Pemilu)*. Yogyakarta : Media Pressindo 1999.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2001.
- Prihatmoko, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Raga maran, Rafael. *“Pengantar Sosiologi Politik”*. Jakarta: Rineka Cipta 2007
- Rust, Michael & Althoff. *“Pengantar Sosiologi Politik”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993.
- Satroadmojo, Sujijono. *Perilaku Politik*. Semarang : Ikip Press 1995.
- Sumartini, L. *Money Politik Dalam Pemilu*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI 2004.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Surbakti, ramlan. *Partai, Pemilu Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997.
- Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Perludem Pres 2007.
- Wibawanto, Agung. *Menangkan Hati Dan Pikiran Rakyat*. Yogyakarta: Pembaharuan 2005.